



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 180 /PMK.08/2012 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 224/PMK.08/2011
TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI
ATAS PINJAMAN DAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH

FORMULIR A : UMUM

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
YANG DIBAYAI DARI PINJAMAN DAN / ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 20....

NAMA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :
NAMA PEMBERI PHLN :

A. DESKRIPSI

- I. NAMA PROYEK PINJAMAN/HIBAH
- II. NOMOR NPPHLN DAN REGISTER
- III. TANGGAL PENANDATANGANAN NPPHLN
- IV. TANGGAL EFEKTIF NPPHLN
 - A. TANGGAL EFEKTIF TENTATIF
 - B. TANGGAL EFEKTIF RIIL
- V. TANGGAL PENUTUPAN NPPHLN
 - A. ORIGINAL
 - B. ACTUAL
- VI. JUMLAH PINJAMAN/HIBAH
 - A. ORIGINAL
 - B. ACTUAL
- VII. TUJUAN
- VIII. SASARAN
- IX. INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (EXECUTING AGENCY)
- X. INSTANSI PELAKSANA (IMPLEMENTING AGENCY)

NO.	INSTANSI PELAKSANA	KATEGORI	ALOKASI DANA (JUTA VALAS)	REVISI/PERUBAHAN (JUTA VALAS)
1		A..... B..... C.....		
2				



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

XI. KATEGORI PINJAMAN

NO.	KATEGORI PINJAMAN	ALOKASI DANA (JUTA VALAS)	DANA PENDAMPING (RP. JUTA)	REVISI/PERUBAHAN (JUTA VALAS)
1				
2				
3				
4				
5				

XII. LINGKUP PEKERJAAN

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

XIII. LOKASI (PROVINSI/KABUPATEN/KOTA)

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	ALOKASI DANA (JUTA VALAS)	REVISI/PERUBAHAN (JUTA VALAS)
1			
2			
3			
4			
5			

XIV. DISBURSEMENT PLAN DAN REALISASI PHLN

Tahun	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total Disbursement Plan	Total DIPA	Total Realisasi DIPA
a.	:						
b.	:						
c.	:						
d.	:						

ku



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

B. PETUGAS YANG DAPAT DIHUBUNGI

I. Kepala <i>Project Management Office</i> /PMU				II. Jabatan Struktural atasan PMU				III.A. <i>Project Implementing Unit</i> I			
Nama	:			Nama	:			Nama	:		
Alamat Kantor	:			Jabatan	:			Jabatan	:		
Nomor Telp	:			Alamat Kantor	:			Alamat Kantor	:		
Nomor Faksimili	:			Nomor Telp	:			Nomor Telp	:		
Alamat E-mail	:			Nomor Faksimili	:			Nomor Faksimili	:		
	:			Alamat E-mail	:			Alamat E-mail	:		
III.B. <i>Project Implementing Unit</i> II				III.C. <i>Project Implementing Unit</i> III				III.D. <i>Project Implementing Unit</i> IV			
Nama	:			Nama	:			Nama	:		
Jabatan	:			Jabatan	:			Jabatan	:		
Alamat Kantor	:			Alamat Kantor	:			Alamat Kantor	:		
Nomor Telp	:			Nomor Telp	:			Nomor Telp	:		
Nomor Faksimili	:			Nomor Faksimili	:			Nomor Faksimili	:		
Alamat E-mail	:			Alamat E-mail	:			Alamat E-mail	:		
IV Lainnya											
Nama	:										
Jabatan	:										
Alamat Kantor	:										
Nomor Telp	:										
Nomor Faksimili	:										
Alamat E-mail	:										

Salinan sesuai dengan aslinya

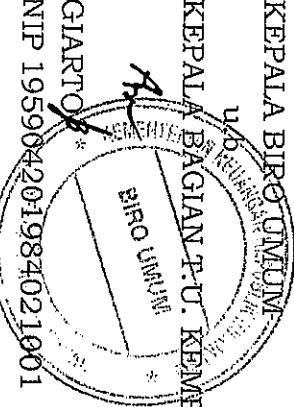
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.T. KEMENTERIAN

ttd.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 180 /PMK.08/2012 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 224/PMK.08/2011 TENTANG
TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS PINJAMAN
DAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH

FORMULIR B.1 : RINGKASAN PELAKSANAAN DALAM TAHUN ANGGARAN 20...

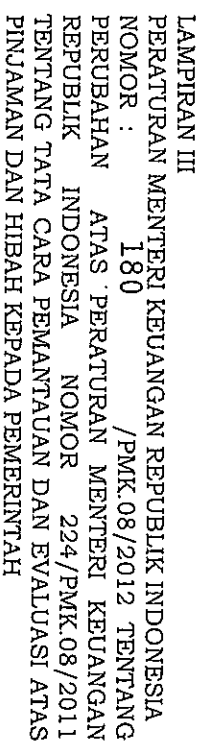
I. KEUANGAN (dalam valas)

PAKET KONTRAK	TATA CARA PENARIKAN (PP/PL/LC/RK)	NILAI KONTRAK DAN STATUSNYA PADA AKHIR TAHUN SEBELUMNYA	PENYERAPAN KUMULATIF SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN SEBELUMNYA	REALISASI PENYERAPAN WTT/HDRAWAL APPLICATION (WA) TH YL	PENYERAPAN PADA TAHUN ANGGARAN 20...									
					TRIWULAN I (1 Jan - 31 Maret)		TRIWULAN II (1 Apr - 30 Jun)		TRIWULAN III (1 Juli - 30 Sept)		TRIWULAN IV (1 Okt - 31 Des)		TOTAL TA 20...	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
[a1]	[a2]	[b1]	[b2]	[c]	[e]	[f]	[g]	[h]	[i]	[j]	[k]	[l]	[m]	[n]
TOTAL														

Nilai tukar satu valas = Rp.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u/b
KEPALA BAGIAN TU KEMENTERIAN
BIRO UMUM
GIARTO
NIP 195904261984021001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO



FORMULIR B.2 : RINGKASAN PELAKSANAAN DALAM TAHUN ANGGARAN 20...

II. PELAKSANAAN FISIK (dalam %)

[illegible]

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO JEMAH

ttq.

KEPALA BAGIAN T.T.U. KEMENTERIAN

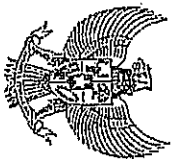
ERRO 35000

GIARTO

NIP 19590420-1984021801

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 180 /PMK.08/2012 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 224/PMK.08/2011
TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS
PINJAMAN DAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH

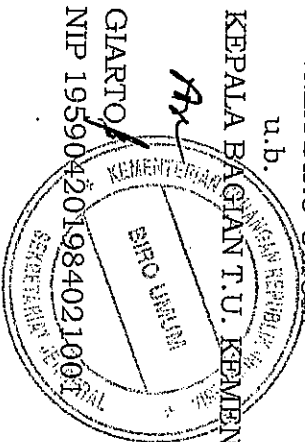
FORMULIR C : STATUS PERMASALAHAN

TAHUN ANGGARAN 20....	PAKET KONTRAK	MASALAH KRITIS YANG MEMPENGARUHI JADWAL DAN PENYERAPAN	TINDAK LANJUT PENYELESAIAN
[a]	[b]	[c]	[d]
TRIWULAN I			
TRIWULAN II			
TRIWULAN III			
TRIWULAN IV			

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 180 /PMK.08/2012 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 224/PMK.08/2011
TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS
PINJAMAN DAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH

FORMULIR D : STATUS PAKET KONTRAK

(Prakontrak, Kontrak, Amandemen untuk Pekerjaan Tambahan, dan Perubahan Lainnya)

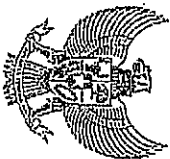
D1. PAKET KONTRAK :

D2. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN (untuk paket prakontrak pada bulan Januari 20.....)	TANGGAL RENCANA	TANGGAL PERUBAHAN	TANGGAL AKTUAL	D3. STATUS KONTRAK Untuk kontrak berjalan pada bulan Januari 20..
PROSES PENGADAAN	(a)	(b)	(c)	(d)
Prakualifikasi				
Oleh Penanggung Jawab Kegiatan				
Peretujuan Pemberi Pinjaman				
Pasca Kualifikasi				
Oleh Penanggung Jawab Kegiatan				
Peretujuan Pemberi Pinjaman				
Evaluasi Pengadaan				
Oleh Penanggung Jawab Kegiatan				
Peretujuan Pemberi Pinjaman				
KONTRAK				
Tandatangan Kontrak				
Peretujuan oleh Bappenas (Bila Diperlukan)				
Peretujuan Pemberi Pinjaman				
Permintaan Uang Muka				
Penarikan Uang Muka				

D4. STATUS TERAKHIR	

- Tanggal Kontrak :
- Tanggal Peretujuan Peminjam :
- Periode Kontrak :
- Tanggal Akhir Kontrak :
- Nama kontraktor/konsultan/suplayer :

45



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

D5. STATUS PENYERAPAN

Dalam Juta Valas

NILAI KONTRAK *)	PENYERAPAN KUMULATIF SAMPAI 31 DESEMBER 20...	Realisasi penyerapan WA TH YL (g)	PENYERAPAN TA 20...									
			Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		TOTAL TA 20..	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)

*) : Perkiraan Jumlah pada saat prakontrak atau jumlah yang terkontrak

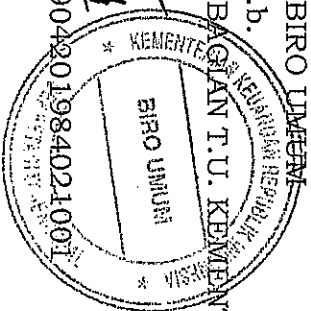
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 180 /PMK.08/2012 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 224/PMK.08/2011
TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS
PINJAMAN DAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH

FORMULIR E : RINCIAN DOKUMEN ANGGARAN

Nama Kegiatan dan Nomor Kode DIPA	PHLN		Rupiah (dalam juta)				Rencana Penarikan PHLN TH YAD (Juta)	
	Valas	Rupiah Ekuivalen (Juta)	Dana Pendamping (Bagian dari PHLN)		Rupiah Murni (Murni APBN)			
			Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
			(a)	(b)	(c)	(d)		(e)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN P.T.U. KEMENTERIAN

tttd.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 180 /PMK.08/2012 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 224/PMK.08/2011
TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS
PINJAMAN DAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH

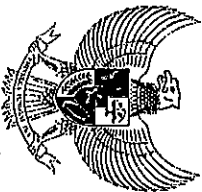
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
YANG DIBAYAI DARI HIBAH DALAM BENTUK UANG
TAHUN ANGGARAN
TRIWULAN

NAMA KEMENTERIAN / LEMBAGA
NAMA PEMBERI HIBAH

- A. DESKRIPSI
- I. NAMA HIBAH
 - II. NOMOR NASKAH PERJANJIAN HIBAH (NPH)
 - III. NOMOR REGISTER
 - IV. TANGGAL PENANDATANGANAN NPH
 - V. TANGGAL EFEKTIF NPH
 - VI. TANGGAL PENUTUPAN NPH
 - VII. NILAI HIBAH
 - VIII. TUJUAN
 - IX. INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (EXECUTING AGENCY)
 - X. INSTANSI PELAKSANA (IMPLEMENTING AGENCY)

NO.	INSTANSI PELAKSANA	ALOKASI HIBAH
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
JUMLAH		

12



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

XI. LINGKUP PEKERJAAN

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. dan seterusnya

XII. DISBURSEMENT PLAN

TAHUN ANGGARAN		DISBURSEMENT PLAN				
A.	:	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	TOTAL
B.	:					
C.	:					
D.	:					
E. dan seterusnya	:					
JUMLAH	:					

XIII. PENDAPATAN HIBAH

PERIODE	UANG MASUK KE REKENING	TELAH DISAHKAN SEBAGAI PENDAPATAN HIBAH
TRIWULAN I		
TRIWULAN II		
TRIWULAN III		
TRIWULAN IV		
JUMLAH		



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

XIV. ALOKASI DIPAN DAN REALISASI HIBAH TAHUN BERJALAN

NO.	PAGU DIPAN	PERIODE		REALISASI BELANJA
		TRIWULAN I		
		TRIWULAN II		
		TRIWULAN III		
		TRIWULAN IV		
		JUMLAH		

B. PETUGAS YANG DAPAT DIHUBUNGI

Nama
Jabatan
Unit Organisasi
Alamat Kantor
Nomor Telp
Nomor Faksimili
Alamat E-mail
:
:
:
:
:
:
:

W



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 180 /PMK.08/2012 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 224/PMK.08/2011 TENTANG
TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS PINJAMAN
DAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
YANG DIBIYAI DARI HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA
TAHUN ANGGARAN
TRIWULAN

NAMA KEMENTERIAN / LEMBAGA :
NAMA PEMBERI HIBAH :

A. DESKRIPSI

- I. NAMA HIBAH :
- II. NOMOR NPH DAN REGISTER :
- III. TANGGAL PENANDATANGANAN NPH :
- IV. TANGGAL EFEKTIF NPH :
- V. TANGGAL PENUTUPAN NPH :
- VI. NILAI HIBAH :
- VII. INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (EXECUTING AGENCY) :
- VIII. INSTANSI PELAKSANA (IMPLEMENTING AGENCY) :

NO.	INSTANSI PELAKSANA	ALOKASI HIBAH	
1.			
2.			
3.			
JUMLAH			

IX. REALISASI HIBAH

NO.	BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA	NILAI	PENGESEAHAN	
			DJPu	KPPN
		Rp -	Rp -	Rp -
		Rp -	Rp -	Rp -
		Rp -	Rp -	Rp -

W



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

B. PETUGAS YANG DAPAT DIHUBUNGI

Nama :
Jabatan :
Unit Organisasi :
Alamat Kantor :
Nomor Telp :
Nomor Faksimili :
Alamat E-mail :

